

**KAJIAN PERANCANGAN PARTISIPATIF DALAM
PENYEDIAAN HUNIAN TETAP**

Studi Kasus Relokasi Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kulon Progo



Disusun oleh:

Septiawan Bagus Panglipur

63170012

Program Studi Magister Arsitektur

Fakultas Arsitektur dan Desain

Universitas Kristen Duta Wacana

2020

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septiawan Bagus Panglipur
NIM : 63170012
Program studi : Magister Arsitektur
Fakultas : Fakultas Arsitektur dan Desain
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KAJIAN PERANCANGAN PARTISIPATIF DALAM PENYEDIAAN
HUNIAN TETAP
Studi Kasus Relokasi Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kulon Progo**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Agustus 2020

Yang menyatakan



(Septiawan Bagus Panglipur)
NIM: 63170012

TESIS
KAJIAN PERANCANGAN PARTISIPATIF DALAM
PENYEDIAAN HUNIAN TETAP
Studi Kasus Relokasi Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kulon Progo

Diajukan kepada Fakultas Arsitektur dan Desain
Program Studi Magister Arsitektur
Universitas Kristen Duta Wacana – Yogyakarta,
Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar
Magister Arsitektur (M. Ars.)

Disusun oleh:
Septiawan Bagus Panglipur
63170012

Diperiksa di : Yogyakarta
Tanggal : 10 AGUSTUS 2020



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D.

Dra. Jeanny Dhewayani, M.A., Ph.D.

Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Arsitektur



Dr. Ing., Ir. Paulus Bawole, MIP.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Kajian Perancangan Partisipatif Dalam Penyediaan Hunian Tetap
Studi Kasus Relokasi Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kulon
Progo
Nama Mahasiswa : Septiawan Bagus Panglipur
No. Mahasiswa : 63170012
Mata Kuliah : Riset dan Tesis Kode : MA4176
Semester : Genap Tahun : 2019/2020
Fakultas : Arsitektur dan Desain Prodi : Magister Arsitektur
Universitas : Universitas Kristen Duta Wacana – Yogyakarta

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis
Fakultas Arsitektur dan Desain, Program Studi Magister Arsitektur
Universitas Kristen Duta Wacana – Yogyakarta
dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Arsitektur pada tanggal
10 AGUSTUS 2020

Yogyakarta, 10 AGUSTUS 2020

Dosen Pembimbing I



Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D.

Dosen Pembimbing II



Dra. Jeanny Dhewayani, M.A., Ph.D.

Dosen Penguji I



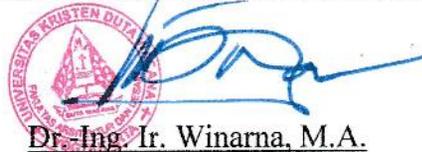
Dr.-Ing. Ir. Winarna, M.A.

Dosen Penguji II



Dr.-Ing. Wiyatiningsih, S.T., M.T.

Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain



Dr.-Ing. Ir. Winarna, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SEPTIAWAN BAGUS PANGLIPUR
NIM : 63170012
Jurusan : Program Studi Magister Arsitektur
Fakultas : Fakultas Arsitektur dan Desain
Judul Tesis : Kajian Perancangan Partisipatif Dalam Penyediaan Hunian Tetap
Studi Kasus Relokasi Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kulon Progo

Dengan ini saya menyatakan Tesis ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Yogyakarta, 10 AGUSTUS 2020

Yang menyatakan,



Septiawan Bagus Panglipur
NIM: 63170012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Tesis ini berjudul “KAJIAN PERANCANGAN PARTISIPATIF DALAM PENYEDIAAN HUNIAN TETAP Studi Kasus Relokasi Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kulon Progo.”

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan pengajaran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Dra. Jeanny Dhewayani, M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 2 yang senantiasa mendukung, membimbing memberi petunjuk, mengarahkan serta memberikan semangat kepada Penulis agar segera menyelesaikan meskipun memiliki jadwal yang sangat padat. Tidak lupa juga Penulis mengucapkan terima kasih kepada para Dosen Penguji, Bapak Dr.-Ing. Ir. Winarna, M.A. dan Ibu Dr.-Ing. Wiyatiningsih, S.T., M.T. karena sudah berkenan menjadi penguji dan memberikan masukan-masukan untuk menyempurnakan penulisan Tesis. Juga kepada Bapak Dr.-Ing. Ir. Paulus Bawole, MIP. selaku Kaprodi serta telah berkenan menjadi moderator sidang yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam penulisan Tesis ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan Tesis ini yang mungkin tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Apabila dalam penulisan ini terdapat kesalahan dalam penulisan nama orang, nama jalan, nama tempat atau kesalahan penulisan lain maka Penulis memohon maaf

karena bukan merupakan suatu kesengajaan. Penulis juga menerima saran dan kritik yang membangun agar dapat melakukan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Terima kasih. Tuhan memberkati.

Penulis,



Septiawan Bagus Panglipur
NIM: 63170012

©UKDWN

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membangun sebuah bandara baru yaitu Yogyakarta International Airport (YIA) yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan tersebut menerjang lahan dan pemukiman warga, oleh sebab itu Pemerintah merelokasi beberapa pemukiman yang terkena pembangunan bandara tersebut ke tempat yang baru. Adapun desa yang terdampak berjumlah 5 desa dan Desa Palihan adalah salah satu desa yang mengalami dampak pembangunan terbanyak. Dusun Kragon II menjadi salah satu dusun di Desa Palihan yang terdampak secara total baik lahan hunian maupun lahan pertanian. Pemerintah memberikan 2 pilihan dalam mengganti kerugian warga atas lahan yang akan digunakan. Kedua pilihan tersebut sama-sama memberikan sejumlah uang tunai pada warga. Perbedaannya ialah warga boleh memilih akan membeli kaveling di area relokasi atau tidak. Pembangunan hunian baru dikerjakan oleh tukang bangunan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, warga hanya terlibat dalam pengawasan saja sembari mengikuti pelatihan keterampilan yang diadakan oleh pemerintah. Kondisi fisik hunian dan lingkungan di area relokasi sangat berbeda dengan kondisi lingkungan sebelum relokasi. Kondisi ini mendesak warga agar dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka yang baru. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi warga terhadap pembangunan hunian baru yang dilakukan oleh pemerintah. Analisis akan dilakukan dengan memperoleh data dari survei, kuesioner dan wawancara sehingga mendapatkan data yang akurat. Dengan data tersebut akan dianalisis sejauh mana perancangan partisipatif yang dilakukan pemerintah dan bagaimana adaptasi warga terhadap lingkungan barunya.

ABSTRACT

The Government of the Special Region of Yogyakarta is building a new airport, namely Yogyakarta International Airport (YIA) which is located in Kulon Progo. The construction hit residential areas therefore the Government relocated several settlements affected by the airport construction to new places. Five villages was affected and Palihan was one of the villages that got the most impacts. Kragon II is one of the hamlets in Palihan that is affected both residential and agricultural land. The government gives 2 choices in compensating residents for the land that will be used. The two options provide a certain amount of cash to residents. The difference is that residents may choose to buy lots in the relocation area or not. The construction of new shelters was carried out by builders who had been prepared by the government. The residents were only involved in supervision while attending skills training held by the government. The physical conditions of the occupancy and environment in the relocation area are very different from the environmental conditions before relocation. This condition urges residents to adapt to their new environment. This occurs due to the lack of citizen participation in the construction of new housing carried out by the government. The analysis will be carried out by obtaining data from surveys, questionnaires, and interviews to obtain accurate data. With this data, the government will analyze the extent of participatory design and how people adapt to their new environment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR DIAGRAM	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan	12
1.4. Manfaat	12
1.5. Struktur Tesis	12
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	15
2.1. Pengertian Perancangan Partisipatif	16
2.2. Tipe-tipe Perancangan Partisipatif.....	18
2.3. Tingkatan Dalam Perancangan Partisipatif.....	20
2.4. Perancangan Partisipatif Dalam Kasus Relokasi	23
2.5. Adaptasi Spasial.....	27
BAB 3 METODE PENELITIAN	29
3.1. Pendekatan Studi.....	29
3.2. Kerangka Penelitian	30
3.3. Survei	31
3.4. Perolehan Data	32
3.5. Metode Analisis	35
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Proses Relokasi Awal Warga.....	37
4.2. Partisipasi Warga	43

4.3. Komparasi Penggunaan Ruang dan Adaptasi Hunian	50
4.4. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Warga Dusun Kragon II	74
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1. Partisipasi Semu dan Keberhasilan Adaptasi Warga	84
5.2. Saran Untuk Kasus Serupa.....	88
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	93

© UKDW

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01:	Peta Kecamatan Temon dan lokasi Yogyakarta International Airport	2
Gambar 02:	<i>Land clearing</i> area lahan proyek Yogyakarta International Airport	4
Gambar 03:	Kondisi hunian tetap di Dusun Kragon II.....	8
Gambar 04:	Puskesmas di area Relokasi Palihan.....	9
Gambar 05:	Masjid di area di area Relokasi Palihan	10
Gambar 06:	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)/Balai Padukuhan.....	10
Gambar 07:	Kerangka alur penelitian	30
Gambar 08:	Letak Kecamatan Temon dalam Peta Administrasi pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017	38
Gambar 09:	Perbandingan luas Desa Palihan sebelum dan sesudah relokasi	43
Gambar 10:	Denah Hunian Tetap Desa Palihan (Dusun Kragon II).....	44
Gambar 11:	Skema pembagian kaveling pada area Relokasi Palihan (Dusun Kragon II)	48
Gambar 12:	Perbandingan rumah Bapak WHT sebelum dan setelah relokasi...55	
Gambar 13:	Tanaman-tanaman milik Bapak WHT.....	56
Gambar 14:	Perubahan zonasi rumah baru Bapak WHT yang sudah berubah karena penyesuaian.....	57
Gambar 15:	Tampak depan rumah Bapak WHT	58
Gambar 16:	Perbandingan rumah Bapak DR sebelum dan setelah relokasi	60
Gambar 17:	Perbandingan rumah Bapak KNT sebelum dan sesudah relokasi ..63	
Gambar 18:	Perbandingan rumah Bapak SMT sebelum dan setelah relokasi....66	
Gambar 19:	Perbandingan zonasi rumah Bapak SMT sebelum dan setelah meminta agar letak kedua rumah bersebelahan.....	67
Gambar 20:	Foto tampak depan rumah Bapak SMT bersebelahan dengan rumah orang tuanya.	68
Gambar 21:	Perubahan tipologi rumah milik Bapak WHT, Bapak DR, Bapak KNT dan Bapak SMT secara keseluruhan.	69
Gambar 22:	Pos Ronda di Area Relokasi Palihan	81

DAFTAR TABEL

Tabel 01: Tangga partisipasi menurut Arnstein.....	21
Tabel 02: Penjelasan tingkat partisipasi masyarakat menurut Arnstein	22
Tabel 03: Keterangan nomor kaveling dan pemiliknya	45
Tabel 04: Penjelasan tentang level partisipasi warga dengan acuan Tangga Partisipasi Arnstein.	70-71
Tabel 05: Perbandingan keadaan ruang dan kebutuhan ruang dalam rumah warga sebelum dan setelah relokasi	73

©UKPDW

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 01: Tanggapan warga terhadap sosialisasi pemerintah tentang pembangunan YIA.....	40
Diagram 02: Respon warga terhadap diskusi tentang pembangunan rumah baru	42
Diagram 03: Respon warga terhadap pernyataan bahwa mereka melakukan pengawasan pada saat rumah baru mereka sedang dibangun.....	49
Diagram 04: Respon warga terhadap kebutuhan ruang untuk rumah mereka.....	51
Diagram 05: Respon warga terhadap pernyataan bahwa rumah baru lebih nyaman dari pada rumah lama.....	52
Diagram 06: Respon warga terhadap kepastian lapangan pekerjaan yang disediakan untuk mereka di bandara internasional.....	76
Diagram 07: Respon warga terhadap cara mereka mengelola uang ganti kerugian	77
Diagram 08: Respon warga terhadap penginvestasian sisa dana pembangunan	78
Diagram 09: Respon warga terhadap kegiatan antar warga di area relokasi.....	80

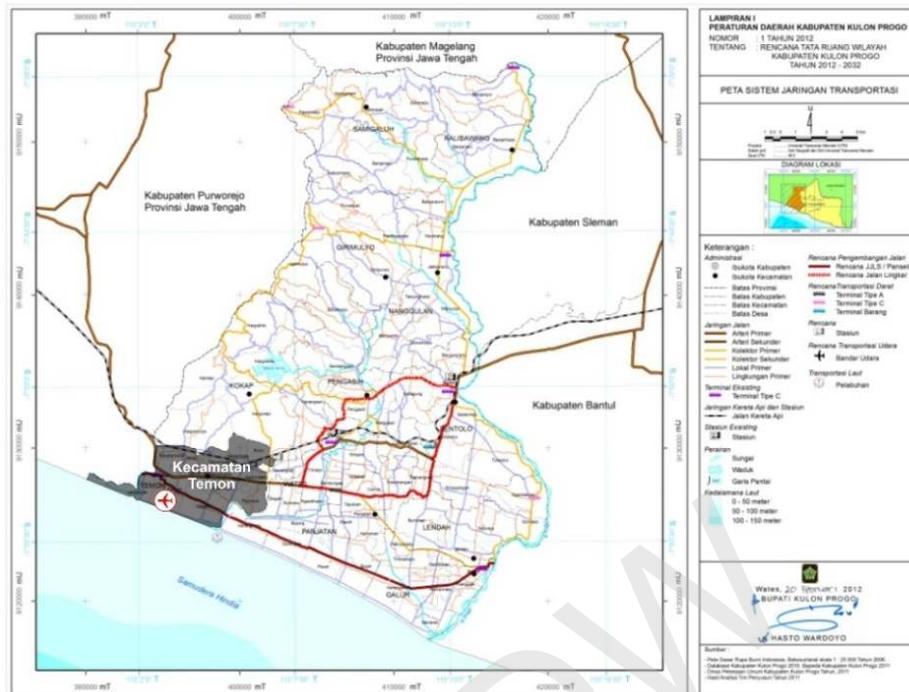
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada awal tahun 2017, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membangun sebuah bandara baru yaitu Yogyakarta International Airport (selanjutnya disebut YIA) yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Proyek pembangunan ini telah tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo no. 1 Tahun 2012 yaitu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 Pasal 11 (lihat Lampiran 01), dalam penjelasan yang menyebutkan tentang sistem jaringan transportasi yaitu jaringan transportasi udara.

Pembangunan tersebut menerjang lahan dan pemukiman warga, oleh sebab itu Pemerintah merelokasi beberapa pemukiman yang terkena pembangunan bandara tersebut ke tempat yang baru. Luas tanah proyek tersebut adalah 587,3 hektar. Keperluan lahan yang luas ini berdampak pada lebih dari 4.400 bidang tanah penduduk dan 2.700 kepala keluarga (KK) yang mencakup di 5 desa, yaitu Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Jangkar, dan Desa Kebon Rejo. Kelima desa tersebut tergabung dalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Temon. Berikut adalah letak Kecamatan Temon berdasarkan data dari Album Peta Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017.



Gambar 01: Peta Kecamatan Temon dan lokasi Yogyakarta International Airport
 Sumber: Album Peta Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu di antara lima kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y.). Secara geografis, Kabupaten Kulon Progo terletak antara $7^{\circ}38'42''$ – $7^{\circ}59'3''$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ}1'37''$ – $110^{\circ}16'26''$ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Kulon Progo memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Magelang, Jawa Tengah; Selatan – Samudera Hindia; Barat – Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah; Timur – Kabupaten Sleman dan Bantul, D.I.Y. Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan, dan 917 padukuhan/dusun. Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates memiliki luas wilayah 58.627,521 hektar (586,28 km²).

Secara geografis Kabupaten Kulon Progo bagian utara merupakan dataran tinggi yang disebut perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500-1.000 meter dari permukaan laut dengan 4 kecamatan yaitu Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, dan Samigaluh. Bagian tengah juga merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian yang sama dengan bagian utara yaitu antara 100-500 meter dari permukaan laut dengan area meliputi 3 kecamatan yaitu Sentolo, Pengasih, dan Kokap. Sementara itu bagian selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut yang meliputi 5 kecamatan yaitu Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan Lendah.

Menurut BPS Kabupaten Kulon Progo (2017:61), proyeksi penduduk tahun 2017 berjumlah 416.200 jiwa, terdiri atas 204.180 laki-laki dan 212.020 perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kulon Progo mengalami pertumbuhan sebesar 0,87% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,89% dan penduduk perempuan sebesar 0,85%. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Kulon Progo pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2016 sebesar 2.887 pekerja dengan kenaikan 4,07%. Sebagian besar kehidupan penduduk Kabupaten Kulon Progo bergantung pada bidang pertanian, yaitu 37,81% penduduknya bergerak di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan.

Proyek pembangunan YIA yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo no. 1 Tahun 2012 diperjelas pada Pasal 18 dengan penjelasan yang

lebih rinci bahwa pembangunan bandara baru tersebut akan terletak di Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur (lihat Lampiran 01). Pembangunan bandara baru tersebut juga mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Bab IV pasal 10 poin D yaitu pelabuhan, bandar udara dan terminal. Pasal ke 11 ayat (1) pada Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib dilakukan oleh Pemerintah dan tanah tersebut selanjutnya menjadi milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah (lihat Lampiran 02). Berdasarkan pada keputusan dan semua acuan perundang-undangan tersebut maka proses pembangunan YIA dimulai sejak Januari 2018. Proses tersebut diawali dengan relokasi penduduk setempat ke daerah hunian baru yang sudah disediakan oleh pemerintah.



Gambar 02: *Land clearing* area lahan proyek Yogyakarta International Airport
Sumber: Dokumentasi Mahendra, 2018

Dalam skema relokasi lahan tersebut, Pemerintah memberikan dana ganti kerugian dalam jumlah yang besar dan menyediakan lahan baru untuk dijadikan hunian warga. Warga mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00 per m² sesuai dengan kesepakatan dan posisi lahan (merupakan lahan produktif atau tidak). Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 36 tentang pemberian ganti kerugian yang dapat berbentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Penilaian besarnya nilai ganti rugi juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 33 yang meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai. Berdasarkan hal tersebut maka memang sudah menjadi hak warga untuk mendapatkan ganti rugi atas tanah yang diminta, dengan cara penentuan nominal yang ditetapkan dalam pasal 34.

Namun demikian, muncul kendala dengan dimulainya pekerjaan pembersihan lahan. Pemerintah menghimbau warga untuk segera pindah ke lokasi hunian yang baru, akan tetapi masih ada beberapa warga yang menolak untuk pindah (direlokasi), walaupun akhirnya secara perlahan mereka tetap pindah karena pekerjaan pembangunan YIA terus berjalan. Keengganan warga untuk pindah berhubungan dengan keraguan mereka tentang bagaimana mereka bisa beradaptasi

dengan kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi kehidupan mereka sebelumnya? Misalnya warga sudah tidak memiliki lahan lagi yang mengakibatkan mereka tidak lagi bisa bertani.

Pemerintah memberikan 2 pilihan dalam mengganti kerugian warga atas lahan yang akan digunakan. Kedua pilihan tersebut sama-sama memberikan sejumlah uang tunai pada warga. Perbedaannya ialah warga boleh memilih akan membeli kaveling di area relokasi atau tidak. Pemerintah menyediakan 27 kaveling yang dapat dibeli warga dan menyediakan jasa konstruksi untuk membantu warga membangun rumahnya, namun mereka harus membayar sendiri biaya pembangunan tersebut. Pihak Angkasa Pura I juga memberikan beberapa pelatihan keterampilan pada warga dengan harapan agar warga memiliki keterampilan baru sehingga tetap dapat bertahan hidup dengan kondisi paska relokasi. Saat ini warga yang tinggal di area relokasi adalah gabungan dari 3-4 dusun. Selain pertanyaan tentang kehidupan yang dilontarkan oleh warga, proses relokasi ini juga menimbulkan pertanyaan yang berhubungan dengan metode perancangan partisipatif dalam desain urban yaitu, apakah proses relokasi kasus Bandara YIA tersebut sudah dilakukan sesuai dengan teori metode perancangan partisipatif untuk menjamin terselenggaranya relokasi yang berhasil dengan baik?

Perancangan partisipatif merupakan suatu model yang berorientasi pada proses dengan pendekatan *bottom-up*, yaitu pendekatan dari bawah, yang melibatkan seluruh warga dalam membangun sebuah area permukiman serta terlibat dalam pembangunan masyarakat. Menurut Pretty dan Guijt (1992:23)

dalam Mikkelsen (1999:63), pendekatan partisipatif harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan warga, serta memberikan sarana yang perlu bagi warga supaya dapat mengembangkan diri. Artinya dengan metode ini dapat diketahui sejauh mana keterampilan warga, bagaimana cara agar dapat memaksimalkannya dan sarana-sarana apa saja yang dibutuhkan warga agar bisa mengembangkan diri. Namun metode tersebut seringkali diterapkan untuk warga yang terdampak bencana alam, sedangkan warga di Kecamatan Temon tidak direlokasi karena mengalami bencana alam, melainkan karena lahan tempat tinggal mereka akan digunakan untuk pembangunan bandara internasional.

Di Kecamatan Temon terdapat 2 desa yang paling banyak dibeli lahannya, yaitu Desa Palihan dan Desa Glagah. Desa Palihan memiliki 9 dusun yaitu Dusun Palihan I, Dusun Palihan II, Dusun Selong, Dusun Kragon I, Dusun Kragon II, Dusun Munggangan, Dusun Ngringgit, Dusun Tanggalon dan Dusun Mlangsen. Dari ke-9 dusun tersebut, terdapat 3 dusun yang lahannya dibeli secara total (hunian dan lahan pertanian) yaitu Dusun Kragon II, Munggangan, dan Ngringgit. Namun dari 3 dusun tersebut hanya Dusun Kragon II saja yang semua tanah warganya dibeli secara total (lahan hunian dan lahan pertanian).

Warga Dusun Kragon II berjumlah 84 KK, namun hanya 27 KK yang tinggal di hunian tetap, sedangkan 57 KK lainnya tidak, mereka berpindah ke luar area Desa Palihan karena ingin mencari kehidupan yang baru terlepas dari desa asalnya. Warga Dusun Kragon II melakukan pindah rumah setelah rumah baru mereka layak ditinggali, sehingga tidak ada hunian sementara.



Gambar 03: Kondisi hunian tetap di Dusun Kragon II.
Sumber: Dokumentasi Panglipur, 2019

Uang ganti kerugian dari Pemerintah ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi warga. Kondisi ekonomi setiap warga saat itu mendadak melonjak naik, yang secara otomatis menyebabkan perubahan pada gaya hidup mereka sehari-hari, hal ini juga terlihat melalui kondisi fisik rumah baru mereka seperti pada Gambar 03. Mereka pun memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari dengan membeli atau berbelanja di pasar atau bahkan di *supermarket*. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi dahulu yang hanya tinggal mengambil bahan makanan dari lading dan kebun mereka. Cepat atau lambat situasi seperti ini akan menghabiskan uang warga padahal sebagian besar warga belum mendapatkan pekerjaan tetap.

Kondisi lingkungan di lokasi hunian tetap sangat berbeda dengan kondisi di desa (sebelum relokasi). Luas lahan yang dimiliki setiap KK di hunian tetap adalah 200 m², kondisi ini sangat jauh berbeda dengan kondisi sebelum relokasi di mana

masing-masing KK memiliki lahan seluas 500-900 m². Dengan lahan yang luasnya hanya 200 m² maka warga tidak bisa melakukan kegiatan *nandur* (menanam) lagi. Pada area Relokasi sudah terdapat 3 bangunan yang difungsikan untuk kegiatan dan kepentingan bersama yaitu Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat, Masjid sebagai tempat untuk beribadah dan Balai Padukuhan sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan kampung seperti Posyandu, Arisan, pertemuan warga dan lain-lain. Puskesmas (Gambar 04) sudah selesai dibangun dan dibuka sejak Januari 2019, Masjid (Gambar 05) sudah dapat digunakan untuk beribadah sejak Juni 2019, kemudian Balai Padukuhan (Gambar 06) selesai dibangun dan dapat digunakan sejak Desember 2019.



Gambar 04: Puskesmas di area Relokasi Palihan.
Sumber: Dokumentasi Panglipur, 2019



Gambar 05: Masjid di area di area Relokasi Palihan.
Sumber: Dokumentasi Panglipur, 2019



Gambar 06: Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)/Balai Padukuhan.
Sumber: Dokumentasi Panglipur, 2020

Pelatihan-pelatihan keterampilan yang diadakan oleh pihak Angkasa Pura I juga belum membuahkan hasil yang maksimal. Sampai pada bulan Juni 2019 hanya ada 6 orang yang berhasil bekerja di bandara, itupun melalui seleksi yang ketat. Selain itu karena bandara juga belum beroperasi secara penuh. Keadaan tersebut menyebabkan sebagian besar warga sampai saat ini belum memiliki pekerjaan. Usaha Pemerintah dalam memberikan uang ganti kerugian dan menyediakan jasa pemborong (kontraktor) untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal yang baru

bagi warga dirasa masih kurang maksimal terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Relokasi yang dialami oleh warga Dusun Kragon II merupakan salah satu bentuk relokasi yang disebabkan oleh pembangunan bandara yang menerjang hunian. Sebagai konsekuensinya, pemerintah memberikan ganti rugi berupa uang tunai kepada warga atas lahan dan hunian mereka serta menyediakan lahan hunian baru dan jasa konstruksi untuk pembangunannya. Tindakan yang telah dilakukan pemerintah tersebut menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat serta memberikan tantangan yang tidak mudah dalam kehidupan sosial, ekonomi dan spiritual mereka karena situasi pada area hunian yang baru berbeda dengan lingkungan di hunian yang lama.

Berdasarkan kondisi tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah,

1. Bagaimanakah metode perancangan partisipatif yang telah diterapkan Pemerintah pada Dusun Kragon II.
2. Bagaimanakah level atau tingkatan partisipasi dalam proses perancangan yang sudah dilakukan.
3. Bagaimanakah cara warga beradaptasi dengan ruang fisik dan ruang sosial yang baru

1.3. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari level perancangan partisipatif yang telah dilakukan pemerintah (di Dusun Kragon II) dan sejauh mana adaptasi warga dengan kondisi lingkungan dan hunian yang baru sehingga dapat memberikan metode perancangan partisipatif alternatif yang diharapkan lebih efektif dan efisien pada kasus-kasus serupa.

1.4. MANFAAT

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan pemikiran dalam metode perancangan partisipatif sesuai dengan level pada Tangga Partisipasi Arnstein. Manfaat praktis dari penelitian ini bagi pemerintah adalah memberikan metode perancangan partisipatif alternatif dan manajemen relokasi yang diharapkan efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan warga dan bagi warga adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perancangan partisipatif.

1.5. STRUKTUR TESIS

Bab 1 Pendahuluan

Bab pendahuluan menjabarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang memuat tentang fenomena relokasi akibat pembangunan YIA yang terjadi di Kecamatan Temon, khususnya di Dusun Kragon II karena warga dari dusun tersebut semuanya terdampak relokasi

karena lahan hunian dan lahan pertaniannya dibeli oleh pemerintah untuk pembangunan YIA. Relokasi yang telah dilakukan oleh pemerintah ternyata telah menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi yang cukup serius bagi warga. Oleh sebab itu muncul pertanyaan yang berkaitan dengan kesesuaian proses relokasi yang sudah dilakukan dengan teori perancangan partisipatif dalam metode perancangan perkotaan yang disarankan oleh para ahli.

Bab 2 Perancangan Partisipatif dan Relokasi Hunian

Bagian ini berisi tinjauan atas artikel-artikel, tulisan-tulisan dan catatan-catatan terdahulu tentang perancangan partisipatif dalam kasus relokasi hunian yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh peneliti dan penulis sebelum ini. Kajian pustaka yang berkaitan dengan perancangan partisipatif, antara lain pengelompokan klasifikasi, serta pustaka yang berkaitan dengan dampak relokasi terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan spiritual warga, juga pembahasan terhadap profil Kabupaten Kulon Progo untuk mendapatkan data kuantitatif dalam hal jumlah penduduk, mata pencaharian dan kondisi geografis.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab tentang metode penelitian ini memuat cara-cara yang telah dilakukan dalam perolehan data primer dan data sekunder baik di lokasi penelitian maupun di lembaga-lembaga terkait dalam fokus dan permasalahan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif komparatif untuk

membandingkan keadaan lahan dan kondisi warga sebelum dan sesudah relokasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori perancangan partisipatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara survei lokasi, wawancara dan kuesioner.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil-hasil survei yang sudah dilakukan dan kemudian dicocokkan dengan teori-teori tentang perancangan partisipatif dan teori tingkat partisipasi menurut Anrstein, kemudian dianalisis dengan metode komparatif untuk mendapatkan suatu model perancangan partisipatif yang lebih tepat untuk kasus relokasi warga Dusun Kragon II dan untuk kasus-kasus relokasi serupa.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab penutup ini adalah kesimpulan dari pembahasan yang sudah dilakukan dan saran-saran bagi pemerintah dan masyarakat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan jika terjadi kasus relokasi yang serupa di masa yang akan datang.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. PARTISIPASI SEMU DAN KEBERHASILAN ADAPTASI WARGA

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa proses relokasi hunian warga untuk kepentingan pembangunan YIA bisa dikatakan berhasil. Warga mendapatkan dana ganti kerugian yang cukup besar, serta mendapatkan rumah yang layak bagi mereka untuk bermukim. Namun demikian, masih perlu diperhatikan lebih baik lagi dalam hal partisipasi masyarakat dalam perancangan dan proses pelaksanaan relokasi ini. Proses relokasi yang terjadi di Desa Palihan, khususnya Dusun Kragon II dapat dikategorikan dalam klasifikasi perancangan partisipatif berdasarkan pada cara keterlibatan dan termasuk dalam tipe partisipatif tidak langsung karena bertumpu pada aspek keterwakilan masyarakat dan dialog pada awal proses saja. Dalam tipe partisipatif tersebut, memang lazim dan paling sering digunakan dalam bidang politik dan kebijakan umum pembangunan.

Perancangan partisipatif yang terjadi pada kasus relokasi tersebut masuk dalam tingkat ke 4 yaitu Tingkat Konsultasi, jika dilihat dengan mengacu pada tangga partisipasi menurut Arnstein (1969). Tingkat Konsultasi merupakan bagian dari tangga Partisipasi Semu. Pada tingkat ini warga diminta berpartisipasi,

mengemukakan pendapat dan pemikiran-pemikirannya namun mereka tidak tahu apakah pemikiran mereka diperhitungkan oleh Pemerintah atau tidak.

Dalam kasus relokasi dan pembangunan kembali hunian warga Dusun Kragon II, Pihak pemerintah pusat mendelegasikan tugas sosialisasi dan relokasi kepada Angkasa Pura I dan perangkat Desa Palihan. Pada saat pembangunan, warga yang seharusnya dapat membangun sendiri (secara gotong royong) secara tidak langsung (karena himbauan Pemerintah) mendelegasikannya kepada pihak kontraktor dan tukang bangunan, hal ini memang dilakukan Pemerintah agar rumah baru warga lekas dapat dihuni dan mereka segera pindah. Perancangan partisipatif dengan jenis ini memang kurang sesuai jika diberlakukan untuk warga yang harus pindah karena adanya pembangunan fasilitas umum (YIA) karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan huniannya. Warga yang terdampak secara total seperti warga Dusun Kragon II kemudian harus melakukan usaha ekstra dalam beradaptasi dengan rumah mereka yang baru. Desakan untuk beradaptasi ini dikarenakan kebutuhan ruang masing-masing warga diabaikan. Perancangan partisipatif jenis ini sesuai dengan tipe Perancangan Partisipatif berdasarkan cara keterlibatan secara tidak langsung menurut Slamet (1994:10).

Pada awalnya, warga berusaha untuk beradaptasi dengan menerima semua kondisi agar dapat selaras dengan lingkungan barunya. Namun semakin lama warga sedikit demi sedikit melakukan reaksi baru dengan perubahan-perubahan fisik pada rumahnya. Ada warga yang akhirnya membeli tanah kaveling di sebelah rumahnya, ada juga yang beradaptasi dengan cara bergantian tidur di ruang keluarga hanya

karena jumlah ruang tidur yang tidak sesuai. Warga melakukan adaptasi *by adjustment* yang dilanjutkan dengan adaptasi *by reaction* seperti menurut Altman (1980:100).

Pada akhirnya, semua pemikiran dan kebutuhan warga yang telah disampaikan dalam konsultasi sepertinya diabaikan oleh pemerintah, meskipun pada awalnya ada harapan bahwa hal tersebut diperhitungkan. Kelemahan dalam level partisipasi konsultatif ini adalah tidak ada kejelasan di awal bahwa pemikiran dan kebutuhan warga akan dipertimbangkan/tidak oleh pemerintah. Oleh karena itulah tingkat kegiatan partisipasi ini termasuk dalam partisipasi semu. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perancangan partisipatif semu yang dilakukan secara tidak langsung dalam kasus relokasi dan pembangunan kembali hunian warga Dusun Kragon II memiliki 3 kelebihan. Pertama, rumah warga di area relokasi lebih cepat terbangun. Kedua, warga tidak perlu memikirkan soal pembangunan rumah yang baru, karena semua sudah dipikirkan oleh pemerintah yang akhirnya didelegasikan kepada para kontraktor. Warga hanya perlu mengawasi pekerjaan pembangunannya saja. Ketiga, warga dapat segera pindah ke area relokasi. Meskipun begitu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perancangan partisipatif semu yang dilakukan secara tidak langsung dalam kasus relokasi dan pembangunan kembali hunian warga Dusun Kragon II justru memiliki lebih banyak kekurangan. Pertama, kurangnya partisipasi warga menyebabkan adanya kebutuhan-kebutuhan ruang yang kurang sesuai. Hal ini secara otomatis mendesak warga untuk beradaptasi dengan hunian barunya. Kedua, bangunan-bangunan yang

berfungsi sebagai fasilitas-fasilitas umum (bangunan yang berfungsi komunal) sangat lambat proses pembangunannya. Sejak awal perpindahan warga ke area relokasi pada akhir tahun 2017, bangunan yang paling cepat selesai dan dapat digunakan hanya Puskesmas yang mulai beroperasi pada Januari 2019, kemudian disusul dengan Masjid yang mulai beroperasi Juni 2019 dan terakhir adalah Balai Pedukuhan pada Desember 2019. Ketiga, lebar jalan di area relokasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada saat sosialisasi. Keempat, kurangnya pemberdayaan masyarakat sehingga masih banyak warga yang belum mendapatkan pekerjaan baru. Para warga yang belum mendapatkan pekerjaan pada akhirnya memilih untuk berwirausaha. Sebagian warga yang sudah lansia memilih untuk tidak bekerja.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perancangan partisipatif berdasarkan cara keterlibatan yang dilakukan secara tidak langsung memiliki lebih banyak kekurangan daripada kelebihan. Kekurangan-kekurangan tersebut bisa saja terjadi karena pesan atau delegasi dari pihak pertama tidak tersampaikan dengan baik kepada pihak yang ditugaskan. Sebagai contoh adalah usulan kebutuhan akan pembangunan kandang komunal yang belum dilakukan, ketidakcocokan kebutuhan ruang yang dibutuhkan warga dalam rumahnya, kurangnya pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.

Selain itu partisipasi yang diterapkan merupakan kegiatan yang semu, atau hanya sebagai formalitas saja. Warga hanya terlibat sebagai pihak yang diberi sosialisasi oleh Pemerintah, diminta pendapatnya namun belum tentu digunakan oleh Pemerintah. Satu-satunya tindakan partisipasi warga yang nyata hanyalah

ketika pembagian kaveling dengan cara dibagi menjadi kelompok-kelompok KK. Warga selaku calon penghuni sayangnya tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan meskipun hanya pembangunan jalan atau fasilitas umum seperti rumah ibadah.

5.2. SARAN UNTUK KASUS SERUPA

Dengan selesainya pembahasan dan analisis berbagai kekurangan dalam partisipasi masyarakat seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya Perancangan Partisipatif yang diterapkan tidak hanya sampai pada tahap Partisipasi Semu dan tingkat Konsultasi saja namun dapat diterapkan hingga tahap Kuasa Warga, minimal sampai pada tingkat Kemitraan sehingga ada kesepakatan antara warga dan pemerintah dalam sebuah perancangan dan semua tanggung jawab dalam pengambilan keputusan menjadi milik bersama (warga dan pemerintah). Oleh karena itu, pemerintah selaku inisiator pembangunan dapat menyediakan fasilitator dalam proyek pembangunan relokasi hunian baru. Peran fasilitator dalam pembangunan sangat penting karena berperan secara netral dan aktif dalam menjembatani komunikasi dan dialog yang setara dan lebih baik antara Pemerintah dengan warga yang terdampak.
2. Pemberian ganti kerugian berupa uang dari Pemerintah dinilai merupakan solusi yang baik, namun itu saja dinilai belum cukup. Warga terdampak

masih memerlukan bantuan untuk mengorganisasi dirinya, membangun kembali rumah tinggal serta beradaptasi.

3. Keputusan untuk menggunakan kontraktor dalam pembangunan rumah warga dinilai cukup baik dalam hal mempercepat proses pembangunan, namun akan lebih baik jika keterlibatan warga sebagai calon penghuni dalam pembangunan lebih dikedepankan. Setidaknya level partisipasi masih bisa diadakan semacam diskusi agar warga dapat menyampaikan kebutuhan-kebutuhan ruang dalam rumah mereka, hal ini dapat menghindarkan tidak terpenuhinya kebutuhan ruang yang sekarang dialami warga. Dalam hal ini kehadiran fasilitator diperlukan untuk melakukan mediasi antara warga dan kontraktor. Dengan demikian proses adaptasi warga kepada lingkungan dan rumah barunya bisa lebih cepat, hal ini tentunya juga membuat warga menjadi lebih cepat merasa nyaman dengan rumah barunya.
4. Fasilitator juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Warga dapat memanfaatkan fasilitator untuk belajar bagaimana mengelola keuangan warga (secara komunal, contoh keuangan dusun). Fasilitator dapat mendorong warga mengadakan kegiatan-kegiatan seperti arisan warga, mengadakan koperasi agar kebutuhan pangan warga tetap tercukupi dalam jangka waktu yang lebih lama. Fasilitator juga dapat berperan membantu pemerintah dalam membagi warga menjadi kelompok-kelompok kecil seperti pembagian RT dan RW. Jumlah KK pada Dusun Kragon II adalah

27 KK, jumlah tersebut dapat dibagi menjadi 2 RT, kemudian didukung oleh Dusun Munggangan yang masih satu lokasi dengan Dusun Kragon II sehingga dalam satu lokasi hunian tetap bisa membentuk 2 RW dengan masing-masing RW terdiri dari 2 RT. Disarankan agar kompleks hunian dibagi menjadi 2 RW sehingga dapat membantu koordinasi dan meringankan pekerjaan Kepala Dusun masing-masing baik Dusun Kragon II maupun Munggangan.

Penelitian yang telah dilakukan semacam ini di masa yang akan datang masih diperlukan dan dapat terus dikembangkan agar proyek relokasi akibat proyek-proyek besar infrastruktur yang sedang dilakukan Pemerintah dapat dilakukan dengan lebih baik. Dari sisi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, riset-riset yang akan datang dapat diarahkan untuk mempelajari tentang level partisipasi dalam organisasi kepemimpinan dan gotong royong masyarakat, evaluasi adaptasi paska huni dan dinamika sosial ekonomi masyarakat di hunian relokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. A. 2017. *Adaptasi spasial penghuni rumah susun sederhana sewa dabag sleman yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Afifah, F. 2013. *Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik (studi kasus: implementasi program audit sosial di lembaga ombudsman daerah istimewa yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Afrizal. 2010. *Menganalisis dampak sosial pembangunan*. Working Paper (tidak diterbitkan).
- Altman, I., Rapoport, A., Wohlwill, J. F. 1980. *Human behavior and environment, advances in theory and research, volume 4 environment and culture*. Plenum Press: New York.
- Arnstein, S. R. 1969. *Journal of American Planning Association*, 35: 4. *A ladder of citizen participation*. 216-224.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. 2017. *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka*. BPS Kabupaten Kulon Progo. Yogyakarta.
- Hadinugroho, D. L. 2002. *Pengaruh lingkungan fisik pada perilaku: suatu tinjauan arsitektural*. USU Digital Library. Universitas Sumatra Utara.
- Hussain, S., Sanders, E. B. N., Steinert, M. 2012. *International Journal of Design* Vol. 6 No. 2. *Participatory design with marginalized people in developing countries: challenges and opportunities experienced in a field study in cambodia*. 91-109.
- Iskandar, Zulrizka. 2012. *Psikologi Lingkungan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mahendra, Y. K. D. 2018. *Perancangan permukiman petani berkelanjutan berbasis relokasi mandiri dengan pendekatan sosio-spasial di kulon progo, daerah istimewa yogyakarta*. Skripsi. Universitas Kristen Duta Wacana.
- Mikkelsen, B. 1999. *Metode penelitian partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Musa. 2009. *Dampak relokasi penduduk terhadap sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah (studi kasus desa siti ambia, desa teluk ambun, desa takal pasir kecamatan singkil kabupaten aceh singkil)*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Pretty, J., Guijt. 1992. *Environment and Urbanization* Vol. 4 No. 1. *Primary environmental care: an alternative paradigm for development assistance*. 22-36.

Sinaga, M. 2017. *Belajar bersama arkomjogja. Pengorganisasian rakyat & hal-hal yang belum selesai*. Yogyakarta: INSISTPress bekerja sama dengan Arkomjogja.

Slamet, Y. 1994. *Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Referensi Online

https://issuu.com/naufalhabib/docs/paper_pascabencana_hunatap_karangkendal_slaman, diakses Juli 2020

LAMPIRAN

©UKDAN